

TANGGUNG JAWAB PT. AMG YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA MEMILIKI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA

Nama : Muhammad Hafizh Hasanain Musyafa
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Ibu Prof. Lanny Kusumawati Dra., S.H., M.Hum.
Bapak Tjondro Tirtamulia S.H., C.N., M.H.

ABSTRAK

Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi dimana proses penggalian bahan tambang itu diperlukan perusahaan yang mengelolanya dan setiap perusahaan pertambangan yang ingin melakukan usaha pertambangan harus menyusun dan memiliki RKAB Tahunan yang sudah disetujui oleh Kementerian ESDM RI. Dokumen RKAB Tahunan wajib disusun oleh perusahaan pertambangan setiap tahun dan diajukan untuk oleh Kementerian ESDM RI yang diperlukan sebagai syarat dalam perizinan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Berkaitan dengan aktivitas kegiatan usaha pertambangan yang apabila terbukti dilakukan tanpa memiliki RKAB yang sudah disetujui oleh Kementerian ESDM RI maka dapat dikenakan sanksi administratif. Penggunaan sanksi administratif merupakan kewenangan pemerintah untuk menetapkan norma-norma dalam Hukum Administrasi Negara sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi perusahaan yang biasanya terletak diujung kaidah hukum.

Kata Kunci : Pertambangan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Sanksi Administratif

TANGGUNG JAWAB PT. AMG YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA MEMILIKI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA

Nama : Muhammad Hafizh Hasanain Musyafa
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Ibu Prof. Lanny Kusumawati Dra., S.H., M.Hum.
Bapak Tjondro Tirtamulia S.H., C.N., M.H.

ABSTRACT

Mining is an endeavour to explore various potentials contained in the bowels of the earth where the mining process of the mining material is required by the company that manage it and every mining company that wants to do mining business must compile and have a work plan and cost budget that has been approved by the minister; which is required as a requirement in the authorisation to carry out mining activities. Mining business activities that if proven to be carried out without having a work plan and cost budget that has been approved by the minister, it can be subject to administrative sanctions. The use of administrative sanctions is the government authority to implement norms in state administrative law, aims to provide a deterrent effect for the company and usually located at the end of the law.

Keywords : Mining, Work Plan and Cost Budget, Administrative Sanctions